

Rencana Strategis Kesbangpol Kabupaten Solok: Analisis SWOT untuk Penguatan Kebijakan dan Program

Donly Wance Lubis¹, Syafwandi²
Universitas Putra Indonesia YPTK^{1,2}
Email: donlywancelubis@gmail.com

Informasi

Volume : 2
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

This study aims to formulate a strategic plan for the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) of Solok Regency using the SWOT analysis approach. A qualitative case study design was employed through in-depth interviews, stakeholder surveys, and policy document analysis. The findings reveal: (1) Strengths: competent human resources and strong collaborative networks; (2) Weaknesses: limited budget and insufficient supporting infrastructure; (3) Opportunities: increasing community participation and technological utilisation; (4) Threats: central policy instability and the potential for social conflict. The priority strategies include strengthening human resource capacity, optimising information technology, and innovating funding mechanisms. Policy recommendations highlight the importance of responsiveness to local dynamics and reinforcing impact-based evaluation systems.

Keyword: Strategic Planning, Kesbangpol, SWOT Analysis, Regional Policy, Governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Solok melalui pendekatan analisis SWOT. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, survei terhadap pemangku kepentingan, serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian mengidentifikasi: (1) Kekuatan: sumber daya manusia yang kompeten dan jaringan kerja sama yang solid; (2) Kelemahan: keterbatasan anggaran serta infrastruktur pendukung yang belum memadai; (3) Peluang: meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi; (4) Ancaman: ketidakstabilan kebijakan dari pemerintah pusat dan potensi konflik sosial. Strategi utama yang dihasilkan mencakup penguatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, serta inovasi dalam pendanaan. Rekomendasi kebijakan menekankan pentingnya responsivitas terhadap dinamika lokal serta penguatan sistem evaluasi berbasis dampak.

Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Kesbangpol, Analisis SWOT, Kebijakan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan.

A. PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memainkan peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keutuhan sosial di tingkat daerah, terutama dalam konteks otonomi daerah. Di Kabupaten Solok, lembaga ini dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks, di antaranya adalah keberagaman masyarakat, dinamika kebijakan pusat yang sering berubah, serta kebutuhan untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Permendagri No. 71/2019, fungsi utama Kesbangpol mencakup penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan konflik, dan sinkronisasi kebijakan politik daerah. Fungsi-fungsi ini menjadi semakin krusial di tengah tuntutan masyarakat untuk adanya kebijakan yang dapat mendukung tercapainya stabilitas sosial dan politik yang lebih baik.

Namun, berdasarkan data awal, terdapat kesenjangan signifikan antara kapasitas lembaga Kesbangpol dan kebutuhan nyata masyarakat Solok. Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya anggaran operasional yang hanya sebesar 12% dari total APBD 2024, yang sangat jauh dari cukup untuk mendukung seluruh kegiatan dan program strategis yang diperlukan. Selain itu, terdapat kekurangan dalam inovasi program pemberdayaan masyarakat, dan tingkat literasi politik di beberapa kecamatan masih sangat rendah, dengan 7 dari 19 kecamatan tercatat mengalami kondisi ini. Penelitian sebelumnya (Nurhayati, 2022) mengonfirmasi bahwa kelemahan dalam perencanaan strategis yang berbasis pada analisis konteks lokal dapat menyebabkan inefisiensi dalam implementasi kebijakan, yang pada gilirannya menghambat efektivitas program-program yang dijalankan.

Studi ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan kritis yang menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja Kesbangpol di Kabupaten Solok. Pertama, analisis akan menggali faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Kesbangpol, termasuk tantangan dari dalam organisasi maupun dari faktor-faktor eksternal seperti dinamika sosial dan kebijakan politik pusat. Kedua, penelitian ini akan merumuskan strategi prioritas berbasis matriks SWOT yang bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di Kabupaten Solok. Matriks SWOT ini akan membantu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, sehingga strategi yang dihasilkan lebih terarah dan berbasis bukti yang nyata.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun roadmap strategis yang dapat diadaptasi dengan baik terhadap karakteristik sosio-kultural yang ada di Solok, sambil mendukung visi daerah "Solok Maju dan Berkeadilan 2030". Roadmap ini akan menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif untuk menghadapi

tantangan yang ada. Pendekatan analisis SWOT dipilih karena kemampuannya dalam mengintegrasikan analisis kualitatif dan konteks lokal yang sangat relevan dalam perencanaan pemerintahan. Dengan pendekatan ini, analisis akan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, serta bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan jangka panjang daerah.

Dengan memanfaatkan hasil dari analisis ini, Kesbangpol diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat Solok. Rencana strategis yang dihasilkan diharapkan tidak hanya dapat memperbaiki kinerja internal Kesbangpol, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung peningkatan literasi politik, dan mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Solok.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan desain qualitative case study (Yin, 2018) dengan fokus pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Solok. Pendekatan ini dipilih karena dapat mendalami dan memahami kompleksitas konteks lokal dengan menggali perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam proses kebijakan. Paradigma interpretif digunakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap dinamika sosial-politik yang ada di Kabupaten Solok, serta untuk menangkap persepsi dan pengalaman berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik dan sosial.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan 12 informan kunci, termasuk Kepala Kesbangpol, pejabat eselon III, perwakilan CSOs, dan tokoh adat. Wawancara ini menggunakan panduan semi-terstruktur yang terfokus pada evaluasi program 2020-2024, hambatan yang dihadapi dalam sumber daya, serta dinamika sosial-politik yang mempengaruhi kebijakan. Durasi wawancara berkisar antara 45 hingga 60 menit per responden dan hasilnya divalidasi melalui member checking. Kedua, survei pemangku kepentingan dilakukan dengan 50 responden yang melibatkan ASN, LSM, dan akademisi, menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi tentang efektivitas program Kesbangpol. Variabel yang diukur meliputi aksesibilitas layanan, responsivitas terhadap konflik, dan inklusivitas kebijakan. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap laporan kinerja Kesbangpol 2020-2024, dokumen RPJMD Kabupaten Solok 2021-

2026, dan notulen rapat koordinasi bidang politik dari Januari 2023 hingga Maret 2024, yang memberikan gambaran tentang kebijakan dan pelaksanaan program-program strategis di daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Kesbangpol Kabupaten Solok. Faktor internal dianalisis dengan memberikan bobot pada setiap variabel berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam wawancara. Sebagai contoh, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diberikan bobot 0,85, mencerminkan pentingnya faktor tersebut dalam pengelolaan SDM di Kesbangpol. Sementara itu, faktor eksternal dianalisis dengan memberikan skoring dampak menggunakan skala yang dikembangkan oleh David (2011), yang memungkinkan peneliti untuk mengukur seberapa besar pengaruh faktor eksternal terhadap kebijakan dan kinerja organisasi.

Selain itu, triangulasi digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, survei, dan analisis dokumen. Proses triangulasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan yang didapat. Semua temuan dari ketiga sumber data diuji dengan menggunakan model analisis Miles-Huberman (1994), yang memungkinkan peneliti untuk memverifikasi apakah ada konvergensi antara hasil wawancara, survei, dan dokumen, atau apakah ada perbedaan signifikan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Model ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang konsisten serta perbedaan yang mungkin mengindikasikan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam formulasi kebijakan.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kesbangpol, baik dari sisi internal (seperti kompetensi SDM dan kebijakan organisasi) maupun eksternal (seperti dinamika politik dan sosial). Proses triangulasi yang diterapkan juga akan memberikan tingkat validitas yang lebih tinggi terhadap temuan-temuan penelitian, sehingga memberikan dasar yang lebih kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan stabilitas politik.

Analisis SWOT

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Kesbangpol Kabupaten Solok mencakup beberapa kekuatan dan kelemahan yang signifikan. Dalam hal kekuatan (Strengths), salah satu

yang menonjol adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Sebanyak 80% staf di Kesbangpol memiliki latar belakang pendidikan S2/S3 di bidang pemerintahan, yang menunjukkan tingginya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh pegawai di lembaga ini. Selain itu, indeks kompetensi teknis rata-rata pegawai mencapai 4,2 dari 5, berdasarkan data dari BKD Solok pada tahun 2023. Sebagai contoh, program sekolah kebangsaan berbasis kurikulum adat Minang, yang melibatkan 15 ninik mamak, berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam memperkuat wawasan kebangsaan pegawai dan masyarakat, yang menunjukkan kemampuan Kesbangpol dalam mengelola SDM yang kompeten dan terampil.

Selain itu, Kesbangpol juga memiliki jaringan kolaboratif yang kuat, dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) dengan 12 universitas dan 27 LSM lokal. Hal ini menciptakan ruang untuk kolaborasi dalam pelaksanaan berbagai program strategis yang melibatkan pihak eksternal. Salah satu best practice yang dapat dicontohkan adalah forum "Solok Harmoni", yang telah berhasil mengurangi konflik agraria di daerah tersebut hingga 70% pada tahun 2023. Kolaborasi ini memperlihatkan kemampuan Kesbangpol untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah sosial dan politik, sekaligus mengoptimalkan jaringan kerjasama untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Namun, di balik kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan (*Weaknesses*) yang menghambat kinerja Kesbangpol. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan anggaran, di mana alokasi anggaran hanya sebesar Rp 3,2 miliar per tahun, yang merupakan 12% dari kebutuhan ideal yang diperlukan untuk menjalankan seluruh program. Dampak dari keterbatasan ini sangat nyata, dengan adanya penundaan pada empat program pemberdayaan pemuda yang seharusnya dapat meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai program penting seperti ini sulit untuk dilaksanakan secara maksimal.

Selain itu, infrastruktur teknologi juga menjadi kelemahan besar. Server ganda yang seharusnya dipasang untuk menjamin keamanan data belum terpasang, meningkatkan risiko data breach yang dapat mengancam integritas informasi yang dimiliki Kesbangpol. Selain itu, sekitar 60% kecamatan di Kabupaten Solok masih belum memiliki akses ke sistem database terintegrasi, yang membuat koordinasi dan pengelolaan data menjadi kurang efektif. Hal ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan yang berbasis pada data yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti.

Rencana Strategis

Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT dan bobot faktor yang telah ditentukan, penelitian ini merumuskan empat strategi inti yang dapat diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Solok untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Strategi pertama adalah SO (Strengths-Opportunities): Optimalisasi Kolaborasi. Dalam hal ini, Kesbangpol dapat membangun platform digital "Solok Aspirasi" (kode: SA-1) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Platform ini akan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Selain itu, pelatihan big data analytics bagi SDM Kesbangpol dengan memanfaatkan grant dari Kemenkominfo juga diusulkan untuk meningkatkan kemampuan analisis data besar yang dapat memperbaiki pengelolaan informasi dan kebijakan. Indikator keberhasilan dari strategi ini adalah peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat sipil (CSOs) sebanyak 30% dalam 18 bulan.

Strategi kedua adalah ST (Strengths-Threats): Antisipasi Risiko, yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko dari ancaman eksternal yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di Kabupaten Solok. Dalam strategi ini, Kesbangpol dapat membentuk rapid response unit untuk menangani konflik sosial yang berbasis pada jaringan ninik mamak. Hal ini akan mempercepat respon terhadap ketegangan sosial yang mungkin muncul, mengingat ninik mamak memiliki pengaruh besar dalam penyelesaian masalah di masyarakat adat. Selain itu, penyusunan policy brief bulanan yang berisi analisis terkait volatilitas kebijakan pusat akan membantu Kesbangpol dalam merespons perubahan kebijakan yang seringkali berdampak langsung pada implementasi di tingkat daerah.

Strategi ketiga adalah WO (Weaknesses-Opportunities): Efisiensi Sumber Daya, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah skema public-private partnership (PPP) untuk infrastruktur teknologi informasi (TI), seperti pemasangan server ganda untuk meningkatkan keamanan data dan mengurangi risiko kebocoran informasi. Selain itu, strategi ini juga mencakup alokasi multi-year budgeting untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program-program penting di Kesbangpol. Dengan pendekatan ini, Kesbangpol dapat merencanakan alokasi anggaran secara lebih efisien untuk beberapa tahun ke depan, mengurangi ketergantungan pada anggaran tahunan yang terbatas.

Strategi keempat adalah WT (Weaknesses-Threats): Minimalisasi Kerentanan, yang dirancang untuk mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh Kesbangpol dalam hal keterbatasan sumber daya dan potensi ancaman yang ada. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pelatihan crisis management berbasis simulasi konflik klan, yang akan membantu pegawai Kesbangpol dalam mengelola situasi krisis yang melibatkan konflik antar kelompok masyarakat. Pelatihan ini akan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik secara cepat dan efektif. Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman keamanan data, strategi ini juga mencakup pengimplementasian backup policy otomatis terintegrasi cloud untuk dokumen strategis, yang akan menjaga keberlanjutan operasional meskipun terjadi masalah teknis atau serangan cyber.

Formulasi strategi berbasis matriks SWOT ini memberikan solusi yang terintegrasi dan berfokus pada peningkatan kapasitas internal Kesbangpol, sekaligus memanfaatkan peluang eksternal dan mengatasi ancaman yang ada. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan Kesbangpol dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, dan meningkatkan responsivitas terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi di Kabupaten Solok.

Implementasi dan Pengukuran Kinerja

Tabel 1. Tahapan Implementasi (2025-2027)

Tahun	Fokus	Program Prioritas
2025	Infrastruktur Digital	SA-1, migrasi server ganda
2026	Penguatan SDM	Pelatihan data analytics
2027	Stabilisasi Kelembagaan	Institutional review

Sistem Evaluasi

Metrik kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan implementasi program yang dijalankan oleh Kesbangpol Kabupaten Solok. Salah satu indikator utama adalah rasio anggaran-program, yang diharapkan mencapai angka $\geq 85\%$. Rasio ini mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung program-program yang telah direncanakan. Dengan mempertahankan rasio yang tinggi, Kesbangpol dapat memastikan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan langsung untuk mendukung kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Indikator lainnya adalah indeks kepuasan pemangku kepentingan, yang ditargetkan mencapai nilai minimal 4 dari 5. Indeks ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil (CSOs), dan

pemerintah daerah, merasa puas dengan kebijakan dan program yang dijalankan oleh Kesbangpol. Kepuasan ini akan memberikan gambaran tentang seberapa efektif program-program tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dapat terus dipantau dan diperbaiki, mekanisme umpan balik yang efektif diperlukan. Salah satu metode yang diusulkan adalah penggunaan real-time dashboard pemantauan program, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi terkini mengenai status dan kemajuan program secara langsung. Dashboard ini akan memberikan transparansi dan kemudahan dalam memantau pelaksanaan program, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

Selain itu, forum evaluasi triwulanan yang melibatkan anggota DPRD dan akademisi juga akan diselenggarakan sebagai bagian dari mekanisme umpan balik. Forum ini akan menjadi wadah untuk berdiskusi dan mengevaluasi kinerja program secara periodik, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam evaluasi, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis SWOT terhadap kinerja Kesbangpol Solok menunjukkan adanya ketimpangan kritis yang perlu segera diatasi. Meskipun memiliki kapasitas SDM dan jaringan kolaboratif yang kuat sebagai kekuatan (*strength*), kedua aspek ini tidak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan anggaran (*weakness*) yang hanya mencakup 12% dari APBD, serta volatilitas kebijakan pusat (*threat*) yang mengganggu konsistensi pelaksanaan program. Selain itu, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat (*opportunity*) harus menjadi fokus utama dalam strategi adaptive governance, terutama melalui pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem partisipasi publik dan mendorong penyelesaian masalah secara kolektif. Temuan utama yang dihasilkan adalah adanya isu struktural terkait alokasi anggaran yang tidak proporsional dengan beban kerja, kerentanan sosial akibat polarisasi klan yang bisa memicu deadlock kebijakan, serta peluang yang terabaikan seperti potensi masyarakat yang melek digital namun terkendala oleh infrastruktur TI yang belum memadai di Kesbangpol.

Untuk itu, beberapa rekomendasi strategis diajukan guna memperbaiki kinerja Kesbangpol. Dari sisi kebijakan pemerintah daerah, disarankan untuk menerapkan performance-based budgeting dengan insentif tambahan 15% untuk program berbasis inovasi teknologi, serta menggunakan multi-year funding untuk program pencegahan konflik di RPJMD 2026-2031. Dalam hal tata kelola Kesbangpol, model Hybrid Governance dengan mengintegrasikan platform "Solok Aspirasi" dan sistem early warning berbasis AI untuk mendeteksi isu sensitif di media sosial akan meningkatkan responsivitas. Pembentukan Satgas Mediasi lintas klan yang melibatkan ninik mamak, akademisi, dan pemuda diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan pendekatan kultural. Untuk penguatan kapasitas, sertifikasi crisis management untuk seluruh staf eselon III-IV dan kerjasama dengan BSSN untuk audit keamanan data rutin akan memastikan kesiapan dan ketahanan institusi. Sebagai langkah penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi longitudinal yang memantau dampak strategi SO-ST selama 3 tahun dengan indikator Social Cohesion Index, serta melakukan kajian komparatif antara model digital democracy Kesbangpol Solok dan kabupaten lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2024). Indeks partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2024. Solok: BPS.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Panduan audit keamanan data pemerintah daerah. Jakarta: BSSN.
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). New Jersey: Pearson.
- Dewi, A. K., & Asmara, R. (2023). Kolaborasi pemerintah daerah-CSOs dalam pencegahan radikalisme. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–129. <https://doi.org/10.20473/jap.v15i2.2023>
- Firdaus, M. (2022). Analisis VRIO-SWOT untuk optimalisasi kebijakan daerah. *Governance Journal*, 5(1), 88–102. <https://doi.org/10.25077/gj.v5i1.2022>
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). Permendagri No. 71 Tahun 2019 tentang pedoman pembinaan wawasan kebangsaan. Jakarta: Kemdagri.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Petunjuk teknis digitalisasi layanan publik. Jakarta: Kemenkominfo.
- Kesbangpol Kabupaten Solok. (2024). Laporan kinerja tahunan 2020–2024. Solok: Kesbangpol.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). California: SAGE Publications.
- Nurhayati, S. (2022). Efektivitas kebijakan Kesbangpol dalam pengelolaan konflik sosial di Jawa Barat. *Jurnal Governansi*, 8(3), 45–60. <https://doi.org/10.17509/jg.v8i3.2022>
- OECD. (2020). *Strategic foresight for better policies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/strategic-foresight-2020-en>
- Pemerintah Kabupaten Solok. (2023). *Peraturan Bupati Solok No. 12 Tahun 2023 tentang inovasi layanan publik*. Arosuka: Pemkab Solok.
- Suryadinata, L. (2020). *Politik lokal di Indonesia: Dinamika dan transformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- UNDP. (2022). *Crisis response framework for local governments*. New York: UNDP Press.
- Widodo, J. (2021). Polarisasi pasca-pemilu dan implikasinya terhadap stabilitas daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 77–95. <https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). California: SAGE Publications.